

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada SKPD Dinas Kota Pontianak)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

NURINDAH TRI WINANDRIA

B 200 181 215

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada SKPD Dinas Kota Pontianak)**

PUBLIKASI ILMIAH

Disusun Oleh:

NURINDAH TRI WINANDRIA

B 200 181 215

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Fatchan Achyani, SE., M.Si

NIDN. 0614086801

HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada SKPD Dinas Kota Pontianak)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

NURINDAH TRI WINANDRIA

B 200 181 215

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 17 April 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

1. Dr. Fatchan Achyani, SE., M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak., CA
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Yuli Tri Cahyono, M.M., Ak
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr. Syamsudin, M.M
NIP: 195702171986031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Februari 2021

Penulis



NURINDAH TRI WINANDRIA

B 200 181 215

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada SKPD Dinas Kota Pontianak)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (PSAPA), pemanfaatan teknologi informasi (PTI), sistem pengendalian internal (SPI), kompetensi sumber daya manusia (KSDM), dukungan manajemen puncak (DMP), dan peran internal audit (PIA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pontianak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden yang bekerja sebagai pegawai bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kota Pontianak. Metode yang digunakan untuk penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Analisis yang digunakan untuk mengolah data yaitu regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dukungan manajemen puncak, dan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci : PSAPA, PTI, SPI, KSDM, DMP, PIA, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of application of accrual-based government accounting standards, the utilization of technology information, internal control systems, competence of human resource, support of top management, and the role of internal audit on the quality of local government financial reports of local government Pontianak City. The data in this study used primary data obtained from respondents who work as financial officer. The method used to determine sample is purposive sampling. The analysis used multiple linear regression to process data. The result of this study show that application of accrual-based government accounting standards and competence of human resource have affect on the quality of local government financial reports. Meanwhile, the utilization of technology information, internal control system, support of top management, and the role of internal audit does not affect on the quality of local government financial reports

Keywords: PSAPA, PTI, SPI, KSDM, DMP, PIA, The Quality of Financial Report

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yang diberlakukan tahun anggaran 2015. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yaitu SAP diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Laporan keuangan yang berkualitas juga ditentukan seberapa baik sistem pengendalian internal yang dimiliki intitusi pemerintah daerah. Dengan lemahnya sistem pengendalian

internal menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh menjadi tidak kompeten. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas juga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia memiliki peran untuk mendasari seseorang mencapai kinerja dalam pekerjaannya serta merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Setiap organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan kualitas laporan yang baik memerlukan dukungan dari atasan. Dukungan manajemen puncak diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dukungan dari atasan yang diberikan kepada para pegawai dapat berupa motivasi, pengawasan kerja, maupun pelatihan kepada pegawai. Semakin baik dukungan yang diberikan atasan kepada pegawai diharapkan semakin baik pula laporan keuangan pemerintah (Wahyuni, 2018).

Faktor yang diduga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu peran internal audit. Menurut *Institute of Internal Auditing* (IIA) dalam Ardeno Kurniawan (2015) audit internal merupakan aktivitas penjamin yang independen dan objektif, juga merupakan jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. Internal audit memiliki tugas untuk mengevaluasi kinerja entitas untuk mengetahui adanya kemungkinan penyimpangan, baik yang bersifat kepatuhan, kecurangan, aktivitas, operasi, atau keefektifan dan relevansi laporan keuangan. Fungsi peran internal audit yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan internal audit terutama dari hasil review atas laporan keuangan pemerintah. Internal audit yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sundari dan Rahayu (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu

terletak pada variabel penelitian dan obyek penelitian, penelitian ini menambah tiga variabel yaitu penerapan standar akuntansi berbasis akrual, dukungan manajemen, dan peran internal audit. Sedangkan obyek penelitian dilakukan pada SKPD Dinas di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang diajukan adalah **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan SKPD Dinas Kota Pontianak”**

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kota Pontianak. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan yang bekerja di SKPD Dinas Kota Pontianak. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode angket, yaitu dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden.

2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang menjadi persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi Keuangan Pemerintah

Menurut Tata Sutabri (2014:3) teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Teknologi informasi yang semakin berkembang akan memudahkan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan suatu keyakinan yang mencakup semua pencapaian yang efektif dan efisien, serta memadai pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

2.1.6 Dukungan Manajemen Puncak

Dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Seorang pegawai yang bekerja dalam pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari dukungan. Apabila tidak ada dukungan dari atasan, maka akan terjadi rendahnya kualitas dalam pembuatan laporan keuangan begitu pula sebaliknya (Wahyuni, 2018).

2.1.7 Peran Internal Audit

Peran internal audit diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Mulyadi (2002: 29), internal audit adalah auditor yang bekerja didalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh manajemen yang telah dipatuhi, menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi serta prosedir aktivitas kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang telah dihasilkan oleh bagian-bagian dari entitas atau organisasi.

2.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Uji regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk analisis regresi linier berganda, model regresi:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1 PSAPA + \beta_2 PTI + \beta_3 SPI + \beta_4 KSDM + \beta_5 DMP + \beta_6 PIA + \varepsilon$$

Keterangan:

KLKPD: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

α	: Konstanta
β_1	: Koefesien regresi PSAPBA
β_2	: Koefesien regresi PTI
β_3	: Koefesien regresi SPI
β_4	: Koefesien regresi KSDM
β_5	: Koefesien regresi DMP
β_6	: Koefesien regresi PIA
PSAPA	: Pemahaman standar akuntansi sektor publik berbasis akrual
PTI	: Pemanfaatan teknologi informasi
PSPI	: Penerapan sistem pengendalian internal
KSDM	: Kompetensi sumber daya manusia
DMP	: Dukungan manajemen puncak
PIA	: Peran internal audit
ε	: Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan, diperoleh sampel sejumlah 64 pegawai dan data yang dapat diolah sebanyak 64 pegawai. Deskriptif dari penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja pada SKPD Dinas Kota Pontianak memiliki jenis kelamin pria yaitu sebanyak 39,1% dan sisanya sebanyak 60,9% berjenis kelamin wanita. Sebagian besar pegawai yang berusia 20 sampai 40 tahun yaitu sebanyak 62,5% dan sisanya sebanyak 37,5% pegawai yang berusia 41 sampai 60 tahun. Sebagian besar pegawai memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 62,5%, jumlah terendah yaitu sebanyak 9,4% pegawai memiliki pendidikan terakhir SMA dan pegawai memiliki pendidikan terakhir D3 dan Magister dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 14,1%. Berdasarkan latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai sebanyak 45,3% memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, latar belakang pendidikan manajemen sebesar 18,8%, latar belakang pendidikan TI sebanyak 6,3% dan sisanya pertanian sebanyak 1,6%. Diketahui bahwa sebanyak 53,1% pegawai bekerja lebih dari 10 tahun, dan yang terakhir sebanyak 21,9% pegawai bekerja selama 1 sampai 5 tahun.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Pengujian variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki nilai $t_{hitung} 3,619 > t_{tabel} 2,002$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,050$, sehingga H_1 diterima yang berarti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhani, et al (2018), Jati (2019), dan Aulia, et al (2019) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian variabel pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan berbasis akrual memiliki nilai $t_{hitung} 1,817 > t_{tabel} 2,002$ dan nilai signifikansi sebesar $0,074 < 0,050$, sehingga H_2 ditolak yang berarti pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembuatan laporan keuangan. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi ini dikarenakan belum adanya jadwal pemeliharaan secara teratur di beberapa instansi sehingga masih terdapat hambatan pada software atau peralatan yang mengalami kendala dan membutuhkan waktu untuk perbaikan yang berdampak pada pelaporan yang harus mengalami penyesuaian. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dilakukan Cahyandari (2017), Chodijah dan Hidayah (2018), Sundari dan Rahayu (2019). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian variabel sistem pengendalian internal pemerintahan berbasis akrual memiliki nilai $t_{hitung} 0,938 > t_{tabel} 2,002$ dan nilai signifikansi sebesar $0,352 < 0,050$, sehingga H_3 ditolak yang berarti sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari jawaban responden sistem pengendalian

internal belum dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan belum optimalnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penerapan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan dan penyelewengan khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu perlu diperlukan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam sistem pengendalian internal khususnya dalam setiap aktivitas anggaran. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Chodijah dan Hidayah (2018), Sundari dan Rahayu (2019), dan Fauzi (2020) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai $t_{hitung} 5,221 > t_{tabel} 2,002$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$, sehingga H_4 diterima yang berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini dikarenakan mayoritas dari pegawai SKPD merupakan lulusan akuntansi yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya. Untuk itu, salah satu faktor terciptanya laporan keuangan yang berkualitas perlu didukung oleh pegawai yang memahami akuntansi pemerintah yaitu pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan harus memahami bagaimana proses dan pelaksanaan pelaporan keuangan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliani dan Agustini (2016), Alfiani (2017), Sundari dan Rahayu (2019). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.5 Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Pengujian variabel dukungan manajemen puncak memiliki nilai $t_{hitung} 0,982 > t_{tabel} 2,002$ dan nilai signifikansi sebesar $0,330 < 0,050$, sehingga H_5 ditolak yang berarti dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini artinya dukungan manajemen belum mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan manajemen puncak belum memberikan perhatian penuh terhadap kualitas sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wahyuni (2018), Kurniawati

(2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.6 Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian variabel peran internal audit memiliki nilai $t_{hitung} -0,640 > t_{tabel} 2,002$ dan nilai signifikansi sebesar $0,525 < 0,050$, sehingga H_6 ditolak yang berarti peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa peran internal audit tidak secara langsung melakukan tugasnya terkait penyusunan laporan keuangan. Mengingat tugas dari internal audit adalah memeriksa, mengendalikan, dan memastikan bahwa instansi telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Logis dalam penelitian ini yaitu hendaknya peran internal audit lebih melakukan pengawasan kepada masalah yang menunjang terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan internal audit dapat memberikan saran atau konsultasi bagi SKPD yang mendapatkan kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis data serta pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga H_1 diterima.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi (PTI) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga H_2 ditolak.
- 3) Sistem pengendalian internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sehingga H_3 ditolak.
- 4) Kompetensi sumber daya manusia (KSDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga H_4 diterima.
- 5) Dukungan manajemen puncak (DMP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga H_5 ditolak.
- 6) Peran internal audit (PIA) tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sehingga H_6 ditolak.
- 7) Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (SAP), pemanfaatan teknologi informasi (PTI), sistem pengendalian internal (SPI), kompetensi sumber daya manusia

(KSDM), dukungan manajemen puncak (DMP) dan peran internal audit (PIA) berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2 Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian, yang mengandung kelemahan yaitu kemungkinan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan responden yang tidak serius dalam mengisi kuesioner, sehingga kemungkinan dapat menimbulkan hasil yang bias.
- 2) Objek pada penelitian ini hanya fokus pada SKPD Dinas, sehingga hasilnya kurang untuk di generalisasi secara luas

4.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara dari beberapa responden penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek yang akan diteliti, sehingga hasil dari penelitian dapat mewakili secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, N. 2017. *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Tegal)*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*, Pertama. Penerbit: Mitra Wacana Media. Jakarta
- Aulia, A. et al. 2019. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Basis Akrua, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Tegal)*. Vol. 11. No.2.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2018). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1*. www.bpk.go.id (diakses pada tanggal 05 Februari 2020).
- Cahyandari, A.D. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Sukoharjo)*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Chodijah, S dan Hidayah, N. 2018. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Skpd Provinsi Dki Jakarta)* Vol 8. No. 1.
- Fauzi, M.S.R. 2020. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad Kabupaten Grobogan).* Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Penerbit: Universitas Diponegoro. Semarang
- Hamzah, Ardi. 2009. *Evaluasi Kesesuaian Model Keprilakuan dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi di Indonesia, Seminar Nasional Aplikasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SNSTI)*. Yogyakarta, 20 Juni 2009.
- Hendra, K. 2018. *Sri Mulyani: Predikat WTP Tidak Menjamin Bebas Korupsi*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4123099/sri-mulyani-predikat-wtp-tidak-menjamin-bebas-korupsi> (diakses tanggal 05 Februari 2020).
- Jati, B.P. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Vol 21. No. 1
- Jogiyanto. 2010. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Penerbit: Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Kurniawati. 2018. *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Kabupaten Karanganyar)*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit: STIE YKPN. Jakarta
- Matindas, R. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia; lewat Konsep AKU (ambisi, kenyataan dan usaha)*. Penerbit: Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Moeheriono. (2010). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintahan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Ramadhani, M. et al. 2018. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten)* Vol.12 No.1. Hal. 40-63.
- Setyawan, S.A. 2018. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Desa Yang Memiliki Bumdes Se Kabupaten Tegal)*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Sundaril, H dan Rahayu, S. 2019. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018)* Vol. 6. No.1.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit: CV. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit: CV. Alfabeta. Bandung.
- Surastiani, D.P dan Handayani. B.D . 2015. *Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018)* Vol. 7. No.2.
- Sutabri, T. 2014. *Pengantar Teknologi Informasi*. Penerbit: Penerbit Andi. Yogyakarta
- Syahroni. 2019. *Pemkot Pontianak Berhasil Raih WTP, Pengamat Nilai Hal-hal Ini Perlu Dilakukan*. <https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/28/pemkot-pontianak-berhasil-raih-wtp-pengamat-nilai-hal-hal-ini-perlu-dilakukan?page=all> (diakses tanggal 05 Februari 2020).
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kedua. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahyuni, T. 2018. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar)*. Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Yadiati, W dan Mubarak, A. 2017. *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Penerbit: Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Yuliani, N.L dan Agustini, R.D . 2016. *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Vol. 4. No.1.